

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Posisi warga negara dalam sebuah negara sangat sentral sekali, apakah bisa disebut negara jika tanpa adanya warga negara. Hal ini karena rakyat merupakan prasarat utama berdirinya sebuah negara. Jika pemikiran ini dikembangkan dengan sebuah pertanyaan, apa yang terjadi jika sebuah negara memiliki rakyat/warga negara, namun warga negara dalam sebuah negara tersebut tidak memiliki kepedulian terhadap negaranya? Maka disinilah muncul perlunya pengetahuan kewarganegaraan.

Data dan fakta yang mendukungnya adalah bahwa, dalam ilmu kenegaraan terdapat empat unsur utama dalam pembentukan negara yakni, wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Tanpa rakyat entitas tidak dapat disebut sebagai negara (Kusumaatmaja, 2016, hlm. 13). Faktanya berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik generasi muda dalam kegiatan Pemilu dan kegiatan lainnya menurun hingga 40% dibandingkan pada penyelenggaraan sebelumnya. Dalam konteks global kurangnya kepedulian warga negara adalah dengan runtuhnya Uni Sovyet pada tahun 1991 menunjukkan bahwa disintegrasi terjadi ketika banyak rakyat merasa tidak terwakili dan tidak peduli lagi terhadap pemerintah.

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan karena Pendidikan kewarganegaraan dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap hak dan kewajibannya. Posisi warga negara dalam sebuah negara sangat sentral sekali, apakah bisa disebut negara jika tanpa adanya warga negara. Hal ini karena rakyat merupakan salah satu prasarat konstitutif berdirinya sebuah negara. Jika pemikiran ini dikembangkan dengan sebuah pertanyaan, apa yang terjadi jika sebuah negara memiliki rakyat/warga negara, namun warga negara dalam sebuah negara tersebut tidak memiliki kepedulian terhadap negaranya? Maka di sinilah muncul perlunya pengetahuan kewarganegaraan. Pengetahuan kewarganegaraan muncul sebagai bagian dari pengetahuan yang multidisipliner

dalam membekali warga negaranya berperan dalam negaranya. Menyiapkan Pendidikan Kewarganegaraan abad 21 saat ini dalam revolusi industri 4.0 bertujuan dalam mewujudkan warga negara yang efektif dan mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya dilakukan di semua tingkatan Lembaga Pendidikan, baik pada tingkat sekolah dasar, menengah maupun pada tingkatan perguruan tinggi. Bentuk pengembangan menurut Banks (2008, hlm. 135) adalah:

“Bentuk pengembangan Pendidikan kewarganegaraan dengan cara melakukan konsepsi ulang, atau mereformulasi Pendidikan kewarganegaraan yang awalnya sebagai sebuah pengetahuan yang akademik menjadi pengetahuan yang mampu mengikuti perubahan zaman, artinya *mainstream* harus di rubah dari pengetahuan akademik saja menuju pengetahuan akademik yang transformatif”.

Isin (2002, hlm. 15) memaparkan bahwa seluruh dunia dengan banyaknya tantangan yang signifikan harus mulai memikirkan, mengkontruksi, dan merevisi kembali mengenai konsep Pendidikan kewarganegaraan. Lebih jauh Isin (2002, hlm. 16), menyatakan bahwa :

“Upaya ini diharapkan warga Negara dapat memahami perkembangan kewarganegaraan, memiliki kesadaran hukum, dan perkembangannya. Studi kewarganegaraan merupakan suatu konsep yang mengandung analitis dan teoritis, sebagai alat untuk mengatasi ketidakadilan ini dengan kedalaman, kepekaan, ruang lingkup dan komitmen, sehingga diharapkan dengan konsep pemikiran tersebut muncul pendidikan dan Perkembangan kewarganegaraan tersebut sebuah konsepsi baru kewarganegaraan yang transformatif” .

Pemikiran Amy Gutman (1987, hlm. 15) menyatakan bahwa, apabila ingin mencapai tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih baik, maka peranan Pendidikan Kewarganegaraan pada lembaga formal pendidikan menjadi elemen yang penting. Pendidikan berbasis lembaga formal pendidikan adalah bentuk pengajaran kewarganegaraan yang paling tepat, namun tidak kalah pentingnya menerapkan Pendidikan kewarganegaraan pada lembaga luar sekolah maupun dalam tatanan bermasyarakat.

Pemikiran lain dipaparkan oleh Kazuko Otsu (2002, hlm. 352) terkait dengan kebijakan pemerintah tentang disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, yakni:

“Pendidikan Kewarganegaraan serta kebijakan pemerintah mengenai disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan mesti mampu mendorong tujuan Pendidikan kewarganegaraan, maka korelasi *stake holder* di lingkungan sekolah akan berperan dalam mendorong generasi muda untuk menjadi lebih baik lagi”.

Sebuah pertanyaan bagaimana dengan urgensi Pendidikan kewarganegaraan di luar lembaga formal pendidikan? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bahwa urgensinya sama, artinya pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada lembaga pendidikan non formal harus dapat berjalan dengan dinamis, kontinu, dan secara konsisten. Pemikiran yang sama disampaikan oleh Cogan (1998, hlm. 142) “*What is called for is a new conception of citizenship education, one in which both schools and the communities they serve and are a part of, are equal partners in the education of each new generation of citizens.*” Hal ini berarti reformulasi Pendidikan Kewarganegaraan perlu kerja sama yang selaras, sejajar, harmonis dan kontinyu antara pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan baik formal maupun non formal dalam mempersiapkan generasi muda yang mampu berperan aktif dalam masyarakat.

Bendix (2002, hlm. 20) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan mendorong negara untuk menciptakan atau mewujudkan kesejahteraan, serta untuk mencapai kesetaraan antar warga negara. Jadi, tugas membangun kembali masyarakat sipil (ruang publik) tidak dapat dicapai tanpa bentuk kewarganegaraan yang dinamis. Selanjutnya menurut Isin (2002, hlm. 19) studi kewarganegaraan haruslah sebuah studi interdisipliner yang tegas. Tidak ada keraguan bahwa kewarganegaraan juga muncul sebagai kebijakan yang menghubungkan tema utama (*domain*) yang berkisar dari kesejahteraan, pendidikan, dan pasar tenaga kerja ke hubungan internasional dan migrasi. Kewarganegaraan menghubungkan ini semua karena ia membawa ketiga permasalahan tersebut ke dalam orbit masalah mendasar. Ketiga permasalahan tersebut dapat dijabarkan yakni, 1) bagaimana batas-batas keanggotaan dalam suatu pemerintahan dan di antara kebijakan harus didefinisikan (luasnya), 2) bagaimana manfaat dan beban

keanggotaan harus dialokasikan, 3) dan bagaimana identitas anggota harus dipahami dan diakomodasi. Sebagai masalah hukum yang sederhana, kebangsaan adalah poros utama dimana orang diklasifikasikan dan didistribusikan di berbagai pemerintahan dalam bagian masyarakat global.

Selanjutnya menurut Levine (2012, hlm. 55) menyatakan bahwa partisipasi atau peran warga negara muda yang aktif akan sangat mendukung terbentuknya kehidupan warga negara muda yang dinamis. *“civics education should help to strengthen and sustain a civil society in which young people participate as citizens and learn the skills, knowledge, and values they need in the broader public sphere dominated by adults”*. Peranan Pendidikan Kewarganegaraan yang transformatif menjadi stimulus terwujudnya kemandirian dalam masyarakat sipil (*civil society*), kemandirian ditunjukkan dengan adanya partisipasi aktif warga negara muda dengan membekali dirinya melalui keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai sebagai bentuk partisipasi di masyarakat.

Adapun menurut Schulz (2010, hlm. 140) untuk mewujudkan pemikiran pemikiran di atas, terdapat kesamaan dari beberapa penelitian yang mendorong agar perlunya untuk mengkontruksi konsep Pendidikan Kewarganegaraan. Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan harus diarahkan tumbuhnya keterampilan, dan watak warga negara yang positif dalam mempersiapkan warga negara muda untuk memahami dunia, memiliki pekerjaan yang produktif, dan menjadi warga negara yang aktif.

Dalam merealisasikan tujuan tersebut, pendidikan kewarganegaraan harus mampu menjawab tantangan tantangan. Konsepsi Pendidikan kewarganegaraan harus mampu mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Maka Konsep pendidikan kewarganegaraan harus ditinjau kembali untuk menyiapkan warga muda yang bertanggung jawab. Jika dicermati pemikiran dari Schulz ini bahwa dengan rekontruksi Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan warga negara muda memiliki keterampilan, mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan produktif. Tiga point ini sangat vital dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Galston (2001, hlm. 483) menyebutkan bahwa negara Amerika Serikat yang mendeklarasikan diri sebagai “pelopor” negara demokrasi pun menyadari peran pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dan perlu untuk mengkonstruksi Pendidikan kewarganegaraan dengan kembali menjadi agenda ilmu politik di Amerika Serikat. Meskipun ada peningkatan besar dalam pencapaian pendidikan formal penduduk AS selama 50 tahun terakhir, tingkat pengetahuan politik hampir tidak bergerak. Maka perlu sekali adanya inovasi pada konsep pendidikan kewarganegaraan. Hasil penelitian dari Galston tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat yang selalu *menggembar-gemborkan* sebagai negara demokrasi, justru partisipasi masyarakatnya tidak mengalami peningkatan. Hal ini tentu menjadi anomali yang mendorong para ahli Pendidikan Kewarganegaraan berpikir untuk merekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan.

China yang dikenal sebagai negara berideologi komunis dengan *single* partainya tentunya pendekatan kepada warga negaranya berbeda dengan Amerika Serikat, walaupun ada perbedaan pendekatan tapi memiliki kesamaan dalam hal Pendidikan Kewarganegaraan yakni harus direkonstruksi. Rekonstruksi yang dilakukan terutama di tingkat Perguruan Tinggi. Menurut Xiao (2010, hlm. 230) Perguruan tinggi harus menyiapkan warga negara memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan profesional, memiliki Pendidikan Kewarganegaraan yang terkait dengan peraturan kerja dan professional, memiliki etika dalam profesi tertentu.

Selanjutnya Xiao (2010, hlm. 234) mengemukakan, bahwa tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa yang merupakan warga negara muda memiliki jiwa kemandirian dan mampu berperilaku yang terkontrol. Oleh karena itu harus dirancang dengan baik dan metode pengajaran juga harus digunakan dengan benar. mengenal dan menganalisis esensi “Pendidikan Kewarganegaraan” dan membandingkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendidikan moral tradisional. Jelas bahwa untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, rekonstruksi harus dilakukan, terutama rekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Produktifitas dan partisipasi warga negara muda berpotensi dalam membentuk identitas suatu masyarakat. Persoalan ini disadari betul bahwa merekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sebuah keniscayaan tersebut harus mampu memperkuat identitas nasional suatu bangsa/masyarakat. Sebuah penelitian di India dan Pakistan menunjukkan bahwa rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan harus diarahkan untuk memperkuat identitas nasional. Menurut Kadiwal dan Jain (2020, hlm. 7) Pembangunan suatu bangsa, pembentukan negara, modernitas, dan demokrasi/otoritarianisme dalam konteks global, gagasan warga negara juga ditandai dengan wacana kewarganegaraan global, gerakan berbasis identitas, dan penegasan kembali nasionalisme.

Identitas nasional didefinisikan tidak hanya dari dalam, yaitu dari ciri-ciri yang dimiliki oleh sesama warga negara tetapi juga dari luar, yaitu melalui perbedaan antar bangsa maupun kelompok etnis lain. Identitas nasional menjadi bermakna ketika ada perbedaan identitas nasional suatu bangsa dengan identitas nasional bangsa lain. Artikel ini memperkenalkan gagasan ‘orang lain yang signifikan’ untuk menyelidiki cara-cara di mana orang lain dapat mengkondisikan pembentukan atau mengarah pada transformasi identitas *in group*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia yang global yang terjadi dan berkembang saat ini, dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi komunikasi. Munculnya internet menjadikan dunia seakan tanpa batas (*borderless*), dunia tanpa sekat yang memungkinkan manusia dapat mencari dan menerima informasi dari penjuru dunia manapun. Menurut Kim dkk (2011, hlm. 809) kejadian maupun peristiwa di belahan dunia manapun dapat dengan mudah telusuri informasinya. Dengan teknologi komunikasi pertemuan dan pembelajaran pun dapat dilakukan dengan bantuan internet.

“Dan perkembangan Internet ini pula yang dapat mendorong serta berkontribusi dalam pertukaran informasi dan pemikiran pemikiran, baik antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan warga, dan warga dengan warga negara”.

Dunia yang global mendorong tidak ada sekat di dunia ini, atau dunia yang tidak ada batas, menjadi dampak kemajuan teknologi. Akan tetapi yang tidak kalah

pentingnya dunia tanpa batas juga membawa tantangan yang berat bagi setiap negara di dunia.

Kondisi dunia yang global tentu memiliki dampak baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak negatif jika tidak ditangani secara serius dapat menjadi ancaman terhadap eksistensi bangsa maupun negara. Datangnya informasi yang silih berganti dapat berakibat kepada tata pola hidup masyarakat di dunia dan sekaligus menjadi sebuah ancaman yang serius. Dengan kecanggihan informasi, suatu negara dapat mempengaruhi atau bahkan “menjajah” dalam bentuk lain atas persoalan persoalan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya negara lain. Negara negara yang telah maju teknologi informasinya dapat dengan mudahnya merusak tatanan maupun identitas negara lain, dan bahkan yang mengkhawatirkan adalah merusak tatanan atas nilai nilai dasar generasi muda suatu bangsa.

Generasi muda di negara yang lemah secara teknologi informasinya, secara perlahan dan massif terkikis nilai nilai identitas nasionalnya. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan filosofi bangsanya menjadi hal yang *kentara* terlihat, sebagai contoh gaya hidup generasi muda yang konsumtif, *hedonism*, *westernisasi*. Mengapa harus westernisasi? Karena Barat lah penguasa teknologi informasi, maka budaya negara yang berkembang seperti Indonesia akan terkikis akan pudar, dampaknya nilai nilai bangsa Indonesia yang *adi luhung* menjadi terabaikan.

Tantangan dan ancaman eksternal juga dapat memberikan dampak besar, dunia yang global dapat memicu sistem demokrasi liberal menjadi semakin luas. Liberalisasi yang terjadi pada berbagai bagian kehidupan, dapat menghadirkan krisis multi-dimensional. Ancaman dan tantangan akan menyebabkan kegentingan dan peristiwa adu kekuatan antar nilai kearifan lokal dengan nilai global. (Dewi Ratih & Ulfatun Najicha, 2021). Identitas nasional ialah karakter atau jati diri yang bertaut dengan identitas suatu negara yang dapat digunakan sebagai pembeda dengan negara lain. Identitas nasional berisi nilai-nilai budaya yang sangat konvensional dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan masa depan suatu negara.

Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan jati diri dan karakter yang dimiliki bangsa tersebut, yang juga dapat menjadi suatu ciri khas dan bisa membedakan dengan identitas bangsa lain. Identitas nasional suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan kebiasaan adat istiadat dalam masyarakat. Sejak dahulu, Bangsa Indonesia tumbuh dengan keberagaman suku, bahasa, budaya, agama yang kemudian disatukan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional Indonesia terdiri dari identitas fundamental berupa Pancasila, identitas instrumental berupa Undang-Undang Dasar 1945, lambang negara Garuda Pancasila, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, identitas religiusitas yaitu berupa keragaman dan toleransi beragama, identitas sosio kultural berupa keragaman suku dan budaya, serta identitas alamiah berupa Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. (Hendrizar, 2020).

Seperti yang kita ketahui, sangatlah penting untuk menjaga dan mempertahankan identitas nasional. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, identitas nasional tersebut akan semakin pudar dan terkikis. Hal ini disebabkan oleh kebudayaan asing yang saat ini dapat dengan mudahnya masuk dan secara tidak langsung akan sangat mempengaruhi eksistensi nilai-nilai budaya yang sudah kita miliki sebagai suatu identitas nasional

Kondisi ini akan memunculkan persoalan persoalan yang global dan harus ditangani secara serius. Jika bangsa Indonesia lengah atas kondisi dan dampak yang ditimbulkan oleh dunia yang global, maka kerugian besar akan menanti bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan semakin terkikis identitasnya, batas batas negara Indonesia yang rentan, akan dengan mudahnya dijadikan alat bagi bangsa dan kelompok kelompok internasional untuk melakukan penyelundupan narkoba, penjualan gelap senjata, dan perdagangan manusia. Dan yang menakutkan adalah generasi muda akan terpuruk menjadi sosok generasi tanpa karakter dan identitas bangsanya. Persoalan identitas nasional menjadi persoalan yang meresahkan, implementasi Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia mengalami degradasi.

Degradasi moral di kalangan mahasiswa merupakan isu yang semakin mendesak dan kompleks, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial,

akademik, dan budaya. Fenomena ini sering kali dipicu oleh perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Dalam konteks ini, mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa, dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai moral yang luhur di tengah arus informasi yang deras dan sering kali tidak terkendali. Penelitian menunjukkan bahwa degradasi moral dapat diartikan sebagai penurunan akhlak atau budi pekerti, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan sosial, media, dan pendidikan yang kurang optimal (Nuraliza, 2025, hlm. 8).

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap degradasi moral di kalangan mahasiswa adalah efek dari dunia yang global. Kondisi Global memungkinkan akses yang lebih besar terhadap informasi dari seluruh dunia, yang sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal dan budaya yang telah ada. Hal ini menyebabkan mahasiswa terpapar pada berbagai norma dan perilaku yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moral yang mereka anut sebelumnya. Dalam konteks ini, penting untuk mengimplementasikan pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan nasional, seperti Pancasila dalam memperkuat identitas dan moral mahasiswa (Fadhillah & Wulan, 2020, hlm. 7).

Fenomena media sosial juga berperan signifikan dalam membentuk perilaku mahasiswa. Media sosial sering kali menjadi sumber informasi yang tidak disaring terlebih dahulu, di mana mahasiswa dapat terpapar pada konten yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Penelitian menunjukkan bahwa berita palsu dan konten negatif di media sosial dapat menurunkan kepercayaan diri dan nilai-nilai moral mahasiswa, sehingga mereka lebih cenderung mengikuti arus yang tidak sesuai dengan etika dan moral yang baik. Maka diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang dampak media sosial terhadap moralitas mereka (Dewitanti, 2025, hlm. 12).

Tantangan yang dihadapi dalam mengatasi degradasi moral di kalangan mahasiswa tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari dalam diri mahasiswa itu sendiri. Banyak mahasiswa yang terjebak dalam gaya hidup hedonis, di mana mereka lebih mementingkan kesenangan sesaat daripada tanggung jawab sosial dan akademik (Juhrocin & Laksana, 2022, hlm. 6). Oleh karena itu penting

untuk menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan akademik di kalangan mahasiswa, agar mereka dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat dan bangsa.

Merebaknya pergaulan bebas dan penggunaan narkoba menjadi bukti lunturnya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Menurut data yang diakses dari (metronews) Sebuah hasil survey menyatakan bahwa 35,9% remaja menyatakan bahwa mereka memiliki teman yang sudah melakukan hubungan seksual pra nikah, bahkan 6,9% responden menyatakan sudah melakukan hubungan badan. Pada tanggal 18 Maret 2022, KPAI melakukan survey terkait dengan merebaknya pergaulan bebas di kalangan remaja. Hasil survey menunjukkan bahwa dari 4.500 remaja yang di survey, 97% pernah melihat film porno, 93,7% pernah berciuman dan melakukan hubungan badan, 62,7% remaja SMP sudah melakukan hubungan seks, 21,2% pernah melakukan aborsi.

Kota-kota di Indonesia dengan angka pergaulan bebas tertinggi adalah Yogyakarta, Bandung, Sragen, dan Jakarta (Viva.co.id). Survey ini dilakukan pada tahun 2007, dan saat ini tahun 2025 rentang waktu 17 tahun kondisi pasti akan berubah, harapkan tentu dapat berkurang, namun tidak menutup kemungkinan pergaulan bebas di kalangan remaja bertambah lebih parah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data survey yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tanggal 07 Juli 2022. Survey dilakukan di kalangan remaja usia rata-rata 14 tahun, hasil survey minor menunjukkan bahwa 56 dari 60 responden menyatakan pernah melakukan hubungan badan. Hasil survey juga menyebutkan bahwa faktor pemicu adalah dunia yang global dan penyalahgunaan media sosial.

Ketiga terjadinya konflik konflik besar bernuansa SARA, konflik konflik yang dapat peneliti paparkan adalah konflik Poso yang terjadi pada tahun 2000. Menurut data yang diakses dari (99.co) Terjadinya konflik besar bernuansa SARA di Poso mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan bangunan sosial di masyarakat. Lebih mengesankan ada “kecenderungan” membiarkan konflik berlangsung lama, sehingga konflik tidak cepat diselesaikan. Konflik horizontal selanjutnya adalah konflik di Sampang Madura pada tahun 2004. Konflik antar umat Islam yang disinyalir pengikut Ahli sunah waljama’ah dengan golongan syiah. Dalam peristiwa

ini 2 rumah jama'ah syiah dan Mushola dibakar dan dirusak. Konflik horizontal yakni konflik antar umat beragama, antara umat Nasrani dengan umat Islam juga terjadi di Aceh pada tahun 2015.

Konflik juga terjadi di Tanjung Badai, Sumatera utara pada tahun 2016 tepatnya tanggal 20 Juli. Konflik ini melibatkan umat Islam dan umat Budha. Akibat konflik 11 wihara dan 2 kantor yayasan dirusak. Dugaan konflik dipicu oleh isu protes suara adzan yang dilakukan seorang wanita dengan melempari masjid dengan batu, serta mengusir Imam Masjid. Sampai saat ini belum ada penyelesaian dan rekonsiliasi antar kubu yang berkonflik. Dengan belum ada rekonsiliasi tentu dapat menjadi bom waktu, yang sewaktu waktu konflik dapat pecah kembali. Pada tahun 2018, di Sentani Papua, konflik bernuansa SARA juga terjadi dengan faktor pemicunya adalah pembangunan menara masjid yang dianggap terlalu tinggi, tentu sepelunya faktor pemicunya yang seharusnya dapat diselesaikan manakala ada komunikasi yang baik.

Adapun menurut data yang diakses dari (okezone.com) Kerusuhan Mei 1998, yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya menjadi catatan kelam bangsa Indonesia. Konflik diawali dengan peristiwa penembakan Mahasiswa Trisakti, yang menjalar menjadi aksi kerusuhan masal dan penjarahan terhadap swalayan swalayan maupun pusat pertokoan. Melebarnya konflik bukan hanya penjarahan, akan tetapi di duga terjadi tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap etnis tertentu. Penyelesaian kasus Mei 1998 juga tidak jelas siapa yang menjadi dalangnya.

Peristiwa SARA juha terjadi di Ambon pada tahun 1999, konflik antara umat Islam dan umat Nasrani, yang merenggut ribuan jiwa dan rusaknya infrastruktur masyarakat. Aparat keamanan diduga gagal meredam konflik dan seakan akan ada unsur membiarkan, dan ada dugaan konflik dibiarkan untuk mengalihkan isu isu besar. Konflik antar etnis bernuansa SARA selanjutnya yakni kasus kerusuhan Sampit pada tahun 2001 di kota Sampit Kalimantan Tengah. Konflik ini melibatkan suku Madura dan suku Dayak, pemicunya adalah pembunuhan warga Dayak oleh warga Madura, dan isu pemerkosaan gadis Dayak. Konflik ini menyebabkan ratusan warga meninggal, dan pembakaran rumah rumah

warga. Konflik dipicu oleh kegagalan beradaptasi warga pendatang dengan warga setempat.

. Konflik yang terjadi juga bukan hanya konflik horizontal tapi juga konflik vertical yakni, konflik antara Pemerintah dengan kelompok separatis, Pemerintah dengan GAM di Aceh, Pemerintah dengan RMS, Pemerintah dengan OPM. Konflik konflik ini juga mengakibatkan korban jiwa. Khusus untuk konflik di Aceh berakhir dengan kesepakatan bersama dengan pemberian otonomi khusus di Aceh.

Keempat kondisi kehidupan masyarakat semakin individualis dan konsumtif. Dasar asumsi kondisi ini adalah berdasarkan dua penelitian, Penelitian Muhamad Arif. judul Individualisme Global di Indonesia (Studi Tentang Gaya Hidup Individualis masyarakat Indonesia di Era Global) Penerbit: STAIN Kediri Press. Kesimpulan dari penelitian dengan proses yang mendalam sebagai berikut, (1) kondisi masyarakat larut dalam pola hidup individualisme global senbagai akibat dari tekanan lingkungan global baik secara langsung maupun tidak langsung, (2) berkembangnya virus individualisme dan hedonisme dipicu oleh lunturnya nilai nilai keyakinan dan nilai nilai idealisme dan pengamalan falsafah bangsa, (3) cara membentengi virus individualisme dan hedonisme dengan penguatan falsafah bangsa yakni Pancasila, dan memperkuat nilai agama.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan beberapa hal:

1. Keberadaan dan keberlangsungan sebuah negara, serta kemandirian masyarakatnya tergantung pada bagaimana generasi muda dipersiapkan. Generasi muda merupakan calon calon pemimpin bangsa di masa depan. Namun jika generasi muda tidak memiliki karakter, mudah teombang ambing oleh kondisi yang semakin menunjukan kemerosotan moralitas sebagai akibat dampak negatif dunia yang global, sehingga terjerumus pada pergaulan bebas, sex bebas, dan menjadi penikmat narkoba. Eksistensi negeri ini dipertanyakan, mau seperti apa negeri ini di masa yang akan datang? Betapa mirisnya degradasi ahklak/moralias mahasiswa/generasi muda, padahal Pancasila sila pertama mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Inti pokok dari sila ini adalah sandaran moralitas, sandaran ahklak dalam berbangsa dan bernegara.

2. Modal sosial bangsa Indonesia adalah kemajemukan/multikultur, Indonesia merupakan sebuah bangsa yang dipersatukan oleh keberagaman Suku, agama, ras maupun golongan. Pemikiran pemikiran sempit, *etno-sentris* menjadikan negeri ini terperangkap dalam konflik konflik yang silih berganti yang seakan akan tidak pernah berkesudahan. Konflik dimulai dari konflik bernuansa agama, etnis maupun konflik vertikal antara pemerintah dengan sekelompok masyarakat. Konflik konflik yang mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya, juga korban materiil/harta, terlebih lebih korban sosial yakni hilangnya nilai nilai kemanusiaan, hilangnya rasa persatuan, yang bisa jadi untuk mengobatinya perlu waktu yang panjang. Bangsa yang religius dengan ber-Ketuhanan yang Maha Esa ini seakan akan runtuh menjadi sebuah bangsa bar bar yang menjijikan. Konflik vertikal bisa saja terjadi karena hilangnya *Trust* kepada pemerintah, rasa keadilan yang dirasakan sebagian daerah, dan kelompok masyarakat seakan tidak pernah dapat diwujudkan oleh pemerintah, menjadi pertanda hilangnya identitas dan karakter bangsa Indonesia.
3. Kerapuhan dan karakter bangsa Indonesia yang senang dengan kehidupan yang sederhana, gemar bergotong royong secara pelan pelan tapi massif tergerus menjadi kehidupan yang individualistik dan konsumtif. Pondasi kemandirian bangsa tergerus oleh arus global yang menjadikan masyarakat Indonesia tumbuh menjadi masyarakat yang individualis, konsumtif, hedonis jauh daripada nilai nilai Pancasila.

Menurut Cogan (1998, hlm. 7) Permasalahan atau problematika global dapat dirangkum menjadi, 1) perkembangan ekonomi secara global, (2) perkembangan teknologi khususnya teknologi komunikasi dengan internetnya yang semakin memuncak, serta 3) persoalan yang terkait dengan lingkungan (eksploitasi lingkungan yang membabi buta) sebagai dampak pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Selain itu menurut Titus (1999, hlm. 133) mengemukakan bahwa persoalan global juga terkait dengan batas lintas negara, kesenjangan ekonomi dunia, persaingan senjata nuklir maupun denuklirisasi, dan kerusakan lingkungan.

Kadiwal dan Jain (2020, hlm. 9) menyatakan bahwa, keprihatinan tentang lunturnya identitas nasional dalam era global harus segera dicarikan solusinya, alternatifnya dengan merekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan. Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan harus diarahkan untuk memperkuat identitas nasional? Karena identitas nasional yang kuat akan menumbuhkan rasa dan jiwa nasionalisme yang berpotensi pada partisipasi politik warga negara muda. Menurut Greenfeld dan Eastwood (2009, hlm. 320) Persoalan atau masalah identitas nasional harus diarahkan pada penguatan nasionalisme, bentuk penguatan nasionalisme dengan memberikan penjelasan yang benar tentang sejarah kebangkitan nasional. Penjelasan sejarah kebangkitan nasional akan membangkitkan jiwa nasionalisme yang akan berimplikasi pada penguatan identitas nasional warga mahasiswa yang merupakan warga negara muda. Smith (1992, hlm. 143) secara tegas menyatakan bahwa:

“Persoalan identitas nasional harus dapat dikembangkan menuju kebangkitan nasionalisme, apalagi dalam kondisi yang global cenderung terjadi pertentangan budaya, antara budaya yang telah mapan dengan budaya *cosmopolitan*. Pertentangan budaya jika tidak dikonstruksi dengan baik akan menimbulkan masalah identitas nasional di kemudian hari, dan tentu ini akan membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.

Persoalan rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan Parker (1999, hlm. 130) menyatakan bahwa, sebagai bagian disiplin ilmu yang multidisipliner, peran Pendidikan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan saat ini guna mengatasi dan memecahkan masalah sebagai akibat gencarnya dampak global yang mengikis sendi sendi identitas nasional. Maka Pendidikan Kewarganegaraan perlu memunculkan perspektif baru dengan rekonstruksinya, dimana perspektif yang baru menuju ke arah perspektif global yang mengembangkan budaya sebagai bagian dari masyarakat global, yakni “*global civic culture*” menuju pada terbentuknya “*transnational civil society*”.

Selanjutnya Bourke dkk (2012, hlm. 163) mengemukakan bahwa, rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan semakin berperan dalam memperkuat identitas nasional bangsa, yang pada muaranya identitas yang dimiliki oleh mahasiswa/warga negara muda tidak akan terkikis oleh kondisi yang global. Pendidikan Kewarganegaraan akan

membentuk identitas nasional mahasiswa, sehingga mahasiswa sebagai warga muda dapat berperan secara aktif dalam dunia yang global. Dengan demikian konsepsi yang ditawarkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan bukan sebagai mahasiswa yang memahami hak dan kewajibannya saja. Mahasiswa harus mampu mengampil peranan penting sebagai bagian dari warga global dengan penuh tanggung jawab, dan langkah ini merupakan salah satu tujuan adanya rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini untuk memberikan gambaran dan kajian, mengenai pentingnya untuk merekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat identitas nasional perspektif global.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kurikulum Prodi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis identitas nasional perspektif global?
2. Bagaimana kajian Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat identitas nasional perspektif global?
3. Bagaimana rekontruksi Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat identitas nasional perspektif global?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Memperkuat Identitas Nasional Perspektif Global (Studi Deskriptif di UPI, UNJ, dan UNNES) ini bertujuan:

1. Mendapatkan gambaran kurikulum prodi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis identitas nasional perspektif global.
2. Menganalisis kajian prodi Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat identitas nasional perspektif global.
3. Merekonstruksi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat identitas nasional perspektif global.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian dari segi teori

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis pengetahuan terkait rekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan, yang merupakan kajian Pendidikan multidisipliner untuk memperkuat identitas nasional perspektif global mahasiswa.

1.4.2 Manfaat Penelitian Dari Segi Kebijakan

Manfaat penelitian dari segi kebijakan diharapkan dengan adanya penelitian ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, utamanya para pembuat kebijakan karena urgensi dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Dunia yang global dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi. Munculnya internet menjadikan dunia tanpa sekat atau dunia tanpa batas, yang membawa dampak signifikan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Peran warga mahasiswa sebagai bagian dari warga global harus memiliki perspektif global.
2. Tidak dipungkiri identitas nasional yang semakin terkikis, dan termarginalkan, harus menjadi pokok kajian kritis para ahli dengan berupaya untuk menguatkan kembali identitas nasional mahasiswa.
3. Sebagai Pengetahuan yang multi disipliner, peran Pendidikan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan identitas nasional dan memiliki perspektif global. Kajian kritis tentang peran serta Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa berkembang secara dinamis.

1.4.3 Manfaat Penelitian Dari Segi Praktis

1. Dapat menggambarkan rekonstruksi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan terhadap identitas nasional perspektif global Mahasiswa.
2. Dapat dianalisa kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat identitas nasional perspektif global mahasiswa.

3. Dapat direkonstruksi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat identitas nasional perspektif global mahasiswa.
4. Kontruksi Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Lembaga pendidikan khususnya pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dalam menyusun kurikulum. Dengan membuka diri terhadap konstruksi Pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi era yang global serta revolusi industry 4.0 maupun menuju revolusi industry pada 5.0.

1.4.4 Manfaat peneltian dari segi aksi sosial

Manfaat penelitian dari segi aksi sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Identitas nasional harus dijadikan instrumen penting dalam mempersiapkan mahasiswa, agar tidak kehilangan jati dirinya, dan tidak meninggalkan nilai nilai yang menjadi ciri bangsa Indonesia.
2. Dunia yang global tidak dapat dihindari, maka mahasiswa harus mampu berperan secara global sebagai bagaian dari masyarakat global yang tidak kehilangan identitas nasionalnya.
3. Pendidikan Kewarganegaraan harus ikut berperan dalam memperkuat identitas nasional mahasiswa dan memiliki perspektif global, maka rekonstruksi pendidikan kewarganegaraan menjadi sebuah keniscayaan.
4. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan kajian akademis kepada semua pihak, baik lembaga formal dan non formal sehingga terwujud aksi nyata dalam merekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan.

1.5 Organisasi Penulisan Disertasi

Secara garis besar organisasi penulisan disertasi ini terdiri dari 6 bab yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis, kebijakan, praktis, dan aksi sosial), serta organisasi penulisan disertasi. Bab ini memberikan kerangka awal yang memperkenalkan konteks penelitian.

2. Bab II Kajian Pustaka. Bab ini mengulas teori-teori yang relevan dengan penelitian, mencakup konsep rekonstruksi pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, perspektif global, dan penelitian terdahulu. Juga disertakan kerangka pikir penelitian untuk memberikan dasar teoretis yang mendalam terhadap analisis dan temuan penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, termasuk desain penelitian, instrumen penelitian, pengumpulan data, partisipan penelitian (kuantitatif dan kualitatif), teknik analisis data, serta prosedur pelaksanaan penelitian.
4. Bab IV Temuan Penelitian. Bab ini memaparkan temuan utama penelitian yang mencakup: gambaran kurikulum Prodi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis identitas nasional perspektif global, dinamika pembelajaran yang memperkuat identitas nasional mahasiswa, serta hasil rekonstruksi kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang diajukan.
5. Bab V Pembahasan Penelitian. Bab ini berisi analisis dan interpretasi mendalam dari temuan penelitian, menghubungkan hasil penelitian dengan teori dan kajian literatur yang relevan. Pembahasan dilakukan secara kritis untuk menunjukkan implikasi teoretis dan praktis dari penelitian.
6. Bab VI Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Bab ini menyajikan simpulan umum dan khusus dari penelitian, implikasi teoritis dan praktis, serta rekomendasi bagi pemangku kebijakan, pengguna hasil penelitian, dan peneliti selanjutnya. Bab ini juga menyertakan dalil-dalil atau prinsip utama yang menjadi panduan penelitian.